

**PEMBERONTAKAN PETANI
DI KECAMATAN KEMUSU-BOYOLALI 1985-1993**

Guntur Arie Wibowo

Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Samudra Langsa, Aceh.
gunturariewibowo@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peristiwa perubahan sosial dimana para petani di wilayah Kemusu pada tahun 80an berani melawan pemerintah yang berkuasa akibat tanah kelahirannya digusur untuk dijadikan area waduk. Artikel ini menggunakan metode historis, yang memiliki 4 metode, yakni pengumpulan sumber, kritik, interpretasi dan historiografi. Peristiwa di Kemusu ini dilatarbelakangi adanya penetapan sepihak atas ganti rugi tanah atas pembangunan waduk dan akhirnya mengakibatkan masyarakat berusaha mempertahankan diri dengan kemampuan mereka. Akibat adanya peristiwa ini mengakibatkan masyarakat Kemusu kini lebih apatis dan tidak lagi mempercayai birokrasi di pemerintahan.

Kata Kunci : *Petani, Perubahan Sosial, Pemberontakan.*

**A. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG**

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting, yang perlu disediakan bagi para pemilik modal. Di samping untuk para pemilik modal swasta yang memang memerlukan tanah untuk kegiatan investasi antara lain di sektor-sektor industri, jasa dan pertambangan, pemerintah sendiri memerlukan tanah guna pembangunan proyek-proyek kepentingan umum seperti jalan raya, jembatan, waduk dan perkantoran pemerintah. Yang tentunya mendatangkan keuntungan yang tidak kecil ke kantong-kantong kontraktor dan pemiliknya. Namun di sisi lain itu semua juga telah merenggut tanah yang merupakan sumberdaya yang begitu penting bagi masyarakat, terutama petani yang umumnya lemah baik secara ekonomis maupun politis. Petani berada dalam posisi yang kalah, dalam arti terpaksa harus tergusur dan menerima ganti rugi

yang relatif kecil yang tidak memadai untuk menopang kelangsungan hidup.

Terancamnya kehidupan subsistensi petani yang disebabkan terambilnya tanah milik petani untuk kepentingan di luar kepentingan sehari-hari merupakan faktor utama munculnya pemberontakan petani. Selain itu, persoalan nilai-nilai sosial yang membudaya dalam masyarakat seperti pemahaman bahwa tanah kelahiran adalah tumpah darah yang sekaligus sebagai tempat tinggal. Hal ini menjadi faktor pendukung munculnya pemberontakan petani dan memperlihatkan bagaimana kuatnya sebuah nilai terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Pemberontakan petani di Kedungombo sendiri pada awalnya dipicu oleh perlakuan sepihak Tim Pembebasan Tanah dan aparat dalam penentuan besarnya ganti rugi tanah untuk ditenggelamkan sebagai area genangan air waduk. Dimana dalam pengadaan tanah

untuk ditenggelamkan sebagai area genangan air waduk, diperlukan pembebasan tanah milik petani baik yang dipakai sebagai pemukiman maupun tanah produktif sumber penghidupan.

Pemberontakan petani di Kedungombo berjalan relatif lama, konsistensi kaum petani pedesaan di Kecamatan Kemusu untuk tetap bertahan dan terus melakukan perlawanan merupakan daya tarik tersendiri. Berbagai bentuk perlawanan terus diupayakan, namun kesemuanya tidak ada yang menjurus pada radikalisasi atau tindakan-tindakan yang radikal dan konfrontatif seperti yang diperlihatkan kaum tani masa-masa sebelumnya, dimana perlawanan yang dilakukan seringkali dengan jalan konfrontasi. Satu hal yang menarik untuk diperlihatkan dalam perlawanan petani Kedungombo adalah dengan cara menggugat pemerintah melalui pengadilan (Stanley, 1994: 27).

TUJUAN PENELITIAN

1. Latar belakang pemberontakan petani Kedungombo di Kecamatan Kemusu.
2. Jalannya pemberontakan yang dilakukan petani Kedungombo di Kecamatan Kemusu.
3. Dampak yang diterima petani Kedungombo di Kecamatan Kemusu berkaitan dengan pemberontakan yang dilakukan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Kecamatan Kemusu

Kecamatan Kemusu merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Dati II Boyolali. Luas Kecamatan Kemusu \pm 99,08 km² atau 9,76% dari seluruh luas Kabupaten Boyolali. Kecamatan Kemusu memiliki batas-batas sebagai berikut : di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Andong dan Kecamatan Klego, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Wonosegoro, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Juwangi dan Kabupaten Purwodadi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sragen, yakni Kecamatan Kemiri. Kecamatan Kemusu memiliki ciri-ciri fisik alam dengan di sebelah selatan dan barat dikelilingi pegunungan kapur yakni Pegunungan Kendeng Selatan, dengan sungai besarnya yakni Sungai Serang yang membelah Kecamatan Kemusu menjadi wilayah utara dan selatan. Sebagai salah satu bagian dari Kabupaten Boyolali, Kecamatan Kemusu terletak pada 110°22'-110° bujur timur dan 7°36'-70°71' lintang selatan. Kecamatan Kemusu merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan kapur, dengan kondisi tanah termasuk jenis tanah asosiasi litosol, regosol kelabu dan margalit gromosol serta crumosol. Wilayah Kecamatan Kemusu berada di atas ketinggian 75-400 m di atas permukaan laut, sehingga pola pertanian awalnya sebagian besar tegalan dengan jenis tanaman palawija (BPS Boyolali, 1989: 4).

Latar Belakang Pemberontakan Petani Kedungombo.

1. Pembangunan Waduk Kedungombo.

Waduk Kedungombo merupakan salah satu proyek Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratunseluna di wilayah Jawa Tengah. DAS ini diupayakan untuk mempertahankan kondisi hidrologi yang baik. Dengan pengelolaan DAS Sungai Serang ini diharapkan dapat menjamin persediaan air dalam jumlah yang cukup menurut waktu dan tempatnya. Genangan waduk terletak di Desa Kedungombo Kecamatan Geyer, Kabupaten Dati II Grobogan ini mencakup tiga kabupaten yaitu Boyolali, Grobogan dan Sragen. Pembangunan Waduk Kedungombo dilakukan karena dapat menghasilkan manfaat-manfaat (Mochtar Pakpahan, 1990: 4-5), sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir guna melindungi

daerah-daerah pertanian, perindustrian dan pemukiman.

b. Meningkatkan penyediaan air irigasi dan pembuatan jaringan suplesinya termasuk pengembangan jaringan irigasi tersier.

c. Meningkatkan penyediaan air dan tenaga listrik untuk daerah-daerah perindustrian dan pemukiman.

d. Membantu meningkatkan kualitas penyediaan air minum masyarakat.

e. Membantu melakukan usaha-usaha pengawetan sumber-sumber daya air dan sekaligus membantu usaha penyelamatan sumber daya tanah.

f. Secara nasional memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah proyek.

2. Faktor Penyebab Pemberontakan Petani Kedungombo di Kecamatan Kemusu.

a. Faktor Obyektif Struktural

Faktor obyektif struktural yang dimaksud berupa struktur kekuasaan, yang meliputi perilaku politik aparatur, mekanisme birokrasi beserta implementasi kebijakan dalam proyek pembangunan, toleransi, partisipatoris dari kekuasaan yang minim diberikan penguasa kepada masyarakat. Faktor-faktor struktural yang memicu pemberontakan petani di Kemusu antara lain :

1) Birokrasi Sentralistik

Persoalan berlarut-larut yang terjadi dalam pembangunan Waduk Kedungombo secara tidak langsung diakibatkan oleh kinerja birokrasi. Dimana birokrasi dalam kasus Kedungombo tidak berperan sebagai media perantara antara pemerintah sebagai kreator pembangunan dengan rakyat sebagai obyek pembangunan. Birokrasi dalam kasus Kedungombo justru berfungsi sebagai alat penguasa, pendekatannya dalam pelaksanaan program pembangunan lebih sering terlihat menjadi otoriter dan melupakan aspek manusiawi (Kritis, 1989 : 18). Dalam konteks unsur pertama penyebab birokrasi sentralistik, menimbulkan berbagai hal yang muaranya melahirkan ketidakpuasan bagi petani. Petani betul-betul dalam posisi menjadi obyek. Kasus

Kedungombo dalam hubungannya dengan birokrasi sentralistik ini antara lain : a) Dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek, aspirasi petani tidak diperhatikan, bahkan ditundukkan secara paksa, dalam hal ini mengenai masalah ganti rugi pembebasan tanah; b) Langkah pertama tersebut disertai tindakan arogansi kekuasaan oleh birokrasi dan militer sehingga membuat marah petani. Unsur kedua dari penyebab birokrasi sentralistik yakni peran militer, praktis militer memainkan dan mendukung kinerja birokrasi-sipil untuk mengamankan proyek. Hal ini membuat petani Kemusu merasa terhina serta mendapat lawan yang transparan yakni militer yang berlaku tidak bersahabat dengan petani (Jaswadi, 2007 : 5).

2) Arogansi Kekuasaan

Kasus Kedungombo menunjukkan bentuk-bentuk arogansi kekuasaan yang menimbulkan ketidaksenangan petani, sehingga akhirnya menjadikan pemberontakan. Adapun bentuk arogansi kekuasaan yang menimbulkan ketidakpuasan rakyat antara lain :

a) Adanya tindakan politik kekuasaan melalui aparat birokrasi menekan, mengintimidasi dan memaksa penduduk dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah.

b) Adanya pendekatan yang tidak simpatik.

c) Adanya berbagai dakwaan ataupun komentar di media massa yang memojokkan penduduk Kemusu.

b. Faktor Subyektifitas Masyarakat

1) Mempertahankan Harga Diri

Kuatnya nilai-nilai budaya yang mengakar di masyarakat petani Kemusu dimana anggapan tanah merupakan warisan nenek moyang yang didiami dan digarap secara turun temurun adalah sah milik petani Kemusu sehingga harus dijaga sampai kapanpun. Kenapa tiba-tiba tanah masyarakat petani Kemusu didata kemudian harus dikosongkan hanya dengan pemberian uang ganti rugi yang rata-rata Cuma Rp.250,00 per meter persegi. Ungkapan *Sedhumuk Bathuk Senyari Bumi Ditohi Tekan Pati*,

mengobarkan semangat untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya saat aparat pelaksana proyek Waduk Kedungombo menyatakan tanah penduduk Kemusu akan dipakai untuk kepentingan pembangunan Waduk Kedungombo dan penduduk Kemusu harus meninggalkan tanahnya (Mochtar Pakpahan, 1990 : 31).

2) Runtuhnya Ikatan Tradisional dan Tatanan Sosial

Proyek pembangunan Waduk Kedungombo mengundang kekhawatiran penduduk akan membuat putus hubungan kekerabatan yang selama ini dijalin dalam ikatan yang kuat serta runtuhnya tatanan sosial yang selama ini telah terbangun. Hal ini menyebabkan strata sosial tertinggi yang paling berkepentingan terhadap tatanan sosial dan ikatan tradisional memilih bertahan untuk tidak meninggalkan daerahnya.

3) Bangkitnya Mitos di Kalangan Masyarakat Kemusu

Mitos yang muncul di pikiran petani Kemusu adalah tentang *Iwak Bader Mangan Manggar* dan *Jaman Pasca Banjir Darah*, dimana ikan-ikan di daerah Serang dan Gagatan akan dapat saling bertemu. Meskipun air genangan Waduk Kedungombo telah menenggelamkan sawah, rumah dan sebagian harta penduduk, masa kemakmuran akan datang kepada penduduk yang bisa bertahan di sekitar genangan air. Orang-orang yang bertahan di sekitar genangan kelak akan mendapat sepetak tanah di daerah yang keadaannya seperti loyang miring. Hal ini kemudian diinterpretasikan sebagai lereng-lereng bukit milik Perhutani seperti Kedungpring dan Kedunglele yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mau pindah dari tanah kelahirannya. Tentang pasca banjir, sebagian penduduk Kedungombo berkeyakinan bahwa akan terjadi "peperangan" yang tidak terelakkan dan apabila penduduk Kedungombo berhasil keluar melewati masa banjir darah akan datang suatu jaman kemakmuran dibawah seorang Erucaka (Stanley, 1994 : 64-70).

4) Proses Pembebasan dan Penetapan Ganti Rugi Tanah

Sesuai dengan landasan hukum pembebasan tanah proyek Kedungombo yang mengacu pada Permendagri no 15 tahun 1975, maka masalah pembebasan tanah di Kecamatan Kemusu berdasarkan pada materi perundangan dan prosedur yang ada di dalamnya. Namun praktek yang ada di lapangan memperlihatkan berbagai penyimpangan, antara lain :

a) Proses pengukuran dan pendataan tanah yang terkena proyek dilakukan dengan prosedur yang tidak transparan.

b) Pendataan atau penghitungan kondisi teknis dan geografis tanah, ditetapkan jumlah ganti rugi yang diterima serta tanah penggantinya dilakukan secara sepihak.

c) Rencana pembangunan Waduk Kedungombo yang memberkan prospek cerah berupa perikanan dan daerah pariwisata menimbulkan daya tarik tersendiri bagi kelompok bisnis untuk mengincar tanah di daerah sabuk hijau.

Jalannya Pemberontakan Petani Kedungombo di Kecamatan Kemusu

Protes petani Kemusu sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1985, ketika terjadi manipulasi pendataan tanah. Penduduk yang merasa eksistensi dirinya terganggu melakukan pemboikotan pendataan tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah. Pemboikotan ini dilakukan dengan cara menolak kehadiran petugas yang akan mendata tanahnya. Bahkan tidak jarang penduduk mengusir petugas, seperti yang terjadi di desa Nglanji, karena jengkel melihat tanahnya diukur tanpa meminta ijin pemiliknya. Pemberontakan petani semakin terlihat transparan dengan dilakukannya pemboikotan pertemuan rutin desa, membendung air yang mengairi sawah milik pamong atau memboikot musyawarah yang difasilitasi birokrat desa untuk membahas mengenai pendataan tanah, tapi kenyataannya menjadi ajang pemaksaan penduduk untuk cap jempol sebagai tanda penyerahan ganti rugi (Stanley, 1994 : 402-419).

Semakin intensifnya pembangkangan yang dilakukan petani dengan menolak ganti rugi yang akan diberikan, kaum perkotaan seperti mahasiswa, LSM,

tokoh-tokoh agama yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik dengan negara memberikan dukungan kepada para petani, yakni terbagi menjadi 3 periode :

a. Periode Pra Penggenangan, dukungan ini dengan cara membentuk Lembaga Bantuan Hukum yang akan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyampaikan permasalahan nasibnya dan terjun langsung untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk yang mendapat tekanan.

b. Periode Saat Penggenangan, pada saat ini kaum perkotaan yang mendukung petani berhadapan langsung dengan pemerintah, tugasnya adalah melindungi serta menyalurkan bantuan sosial kepada penduduk.

c. Periode Pasca Penggenangan, dimana dalam masa ini dukungan yang diberikan berupa dukungan hukum maupun non hukum.

Dalam perjalanannya, gerakan protes petani pedesaan Kecamatan Kemusu, baik setelah berinteraksi dengan kaum perkotaan atau sebelumnya, menggunakan beberapa bentuk gerakan pemberontakan, diantaranya adalah :

a. Gerakan berwujud pembangkangan, yakni petani Kemusu menolak untuk pindah serta menerima ganti rugi baik tanah pemukiman (transmigrasi) maupun dalam bentuk uang.

b. Gerakan berwujud aksi massa, dimana secara terorganisir petani Kemusu melakukan pemberontakan secara terbuka untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya (Stanley, 1994: 135-172).

c. Kampanye secara terbuka terhadap nasib yang dialami oleh petani Kemusu. Kampanye ini dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian sehingga meningkatkan posisi dalam melakukan tawaran politik.

Protes dalam bentuk lain adalah melalui jalur litigasi (gugatan hukum). Gugatan paling fenomenal dilakukan oleh 54 petani Kedungpring yang terdiri dari 28 pemilik tanah dan bangunan dan 26 pemilik bangunan terhadap pemerintah yang dilakukan sejak akhir 1990. namun hal ini berakhir kekalahan. Atas kekalahan tersebut kemudian 34 petani (20 orang

mundur) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, namun kembali mengalami kekalahan. Sehingga pada akhirnya para petani tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam kasasi ini gugatan para petani dimenangkan.

Dampak yang diterima petani Kedungombo di Kecamatan Kemusu berkaitan dengan pemberontakan yang dilakukan

Keadaan di daerah Kemusu mengalami berbagai perubahan semenjak penduduk Kecamatan Kemusu melakukan pemberontakan menentang proyek Kedungombo antara tahun 1985-1993 karena minimnya ganti rugi yang diterima. Perubahan itu sedikit banyak sebagai dampak Proyek Kedungombo yang meliputi berbagai hal, yang paling jelas terlihat adalah perubahan keadaan fisik atau sarana dan prasarana masyarakat. Konsekuensi dari pemberontakan petani adalah berbagai tekanan yang secara langsung diterima oleh penduduk, hal ini tidak hanya berhenti sampai pada sebuah sikap represif dari birokrat pemerintahan daerah dan militer lokal, namun memiliki akibat terhadap hubungan sosial dalam masyarakat setempat. Sikap apatis, mudah curiga, terputusnya hubungan kekerabatan tradisional merupakan rentetan panjang dari pembangunan Waduk Kedungombo.

a. Perubahan Sikap Masyarakat

Masyarakat Kemusu berubah menjadi bersikap apatis terhadap kebijakan politik pemerintah. Hal ini seperti tercermin pada saat gugatan penduduk Kedungpring yang dimenangkan dengan Kasasi di Mahkamah Agung. Menanggapi keberhasilan tersebut, petani Kemusu tidak terlalu yakin akan kemenangan tersebut. Lebih keras lagi diperlihatkan oleh penduduk Kedungpring yang merasa tidak memiliki kepala desa dan merasa dikucilkan pemerintah, meskipun secara administratif formal dukuh ini bersama tiga dukuh eks Nglanji dimasukkan ke desa Kedungrejo.

b. Terputusnya Hubungan Kekerabatan

Sikap disintegrasi juga terasa dalam kehidupan masyarakat Kemusi, terutama

di desa Kedungpring, Kemusu dan Mlangi. Penduduk yang masih bertahan bersikap memusuhi penduduk yang sudah pindah ke luar genangan sekalipun dahulu adalah saudara, tetangga atau sahabatnya. Penduduk yang mau pindah ke daerah di luar genangan dicaci maki dengan berbagai hinaan seperti "orang yang tidak memiliki otak dan tidak mau rukun". Sebagai akibat kesulitan yang dihadapi tiap keluarga karena kehilangan lahan pertanian, kesediaan penduduk untuk bergotong royong dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umum, seperti memperbaiki jalan ikut merosot juga.

c. Perubahan Sosial Ekonomi

Tergenangnya sebagian wilayah Kecamatan Kemusu, berarti luas areal pertanian yang menjadi tumpuan hidup ikut berkurang. Hal ini mengakibatkan produksi tanaman pangan khususnya padi mengalami penurunan. Selain kekurangan pangan, banyak penduduk di daerah genangan yang terkena wabah penyakit cacangan, kulit dan perut. Hal ini karena masalah sanitasi di daerah genangan sangat kotor. Dalam bidang pendidikan, dengan dilarangnya kelompok belajar yang didirikan YB. Mangunwijaya di Kedungpring, sebagian besar anak-anak usia sekolah terlantar (Suara Merdeka, 1991 : 11).

C. KESIMPULAN

Latar belakang protes petani di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali antara lain : a) Faktor obyektif struktural, diantaranya birokrasi sentralistis yang dampak akhirnya kepada penetapan sepihak ganti rugi tanah, arogansi kekuasaan yang substansinya mengarah pada pengabaian partisipasi rakyat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan waduk, b) Faktor subyektif masyarakat, diantaranya mempertahankan harga diri, runtuhnya ikatan tradisional dan tatanan sosial, bangkitnya mitos akan datangnya masa kemakmuran di masa depan, dan proses pembebasan tanah yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Jalannya pemberontakan petani di Kecamatan Kemusu diawali adanya pembangkangan atas pendataan tanah, pemboikotan atas pertemuan sepihak yang diadakan oleh jajaran birokrasi lokal. Dampak pemberontakan petani diantaranya adalah perubahan sikap petani Kemusu yang lebih apatis dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap birokrasi, terputusnya hubungan kekerabatan di antara petani karena perbedaan pendapat, perubahan sosial ekonomi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Yunida Pangastuti. 1989. Juni No. 1.
”Birokrasi Sentralistis dan Faktor-
Faktor Penyebabnya : Sebuah
Ilustrasi Pembangunan Waduk
Kedungombo”. Kritis. 18.
- ”Anak Kedungpring Yang Terlantar
Akan Ditampug di SD
Kedungrejo”. 1991. April 2. Suara
Merdeka. 11.
- Jaswadi, H.S. 2007. Sejarah Proyek
Kedungombo Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali. Boyolali.
- Mochtar Pakpahan. 1990. Menarik
Pelajaran Dari Kedungombo.
Jakarta : Forum Adil Sejahtera.
- Stanley. 1994. Seputar Kedungombo.
Jakarta : ELSAM.